

Manajemen Media Komunikasi pada Aplikasi ASSiK di Surabaya dalam Perspektif Islam

Rio Febriannur Rachman ¹

¹ Universitas Islam Syarifuddin, Indonesia; riofrachman21@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 6 No 1 May 2025
<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i1.133>

Received: March 20, 2025
Accepted: April 25, 2025
Published: May 06, 2025

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : Following the COVID-19 epidemic, digital transformation in public services has emerged as a strategic imperative. This study looks at how the Surabaya City Government's digital innovation in the employment sector, the ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) application, is managed through communication medium. This study examines how user experiences with ASSiK are framed as a kind of technology, spiritual values, and social interaction using a qualitative approach and phenomenological approaches. The study's findings demonstrate that ASSiK serves as a two-way public communication platform that is inclusive, transparent, and flexible in addition to being a digital job recruitment platform. The principles of Maqasid Sharia in Islam, particularly the protection of life (hifz al-nafs), property (hifz al-mal), and reason (hifz al-'aql), are in line with this innovation, which also helps to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly goal 8 on decent work and economic growth. The results of the study show that ASSiK is a symbol of moral and welfare-focused public policy in addition to being an administrative tool. In order to enhance the ethical aspect of public service in the age of technological revolution, this study suggests incorporating Islamic principles into digital innovation governance.

Keywords: *ASSiK, Communication Media Management, Maqasid Syariah, Digital Public Services, SDGs, Phenomenology.*

Pendahuluan

Pendahuluan harus secara Transformasi digital di sektor pelayanan publik telah menjadi agenda prioritas dalam pembangunan nasional, terlebih setelah pandemi COVID-19 mempercepat kebutuhan akan sistem komunikasi dan layanan yang efisien, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Rachman, 2021). Salah satu respons konkret atas situasi tersebut dapat dilihat pada inovasi Pemerintah Kota Surabaya melalui aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo), yang dirancang sebagai platform digital penempatan kerja (Ramadhan, Janna, Annisa, & Sandi, 2025). ASSiK menjadi media komunikasi interaktif antara pencari kerja dan perusahaan, yang mempercepat proses rekrutmen secara transparan dan tanpa tatap muka langsung (Prasetyo, Nanda, Suyatno, Pradika, & Widiyarta, 2024).

Inovasi ASSiK mencerminkan bagaimana teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi menjadi kekuatan determinatif yang membentuk praktik sosial, termasuk dalam konteks ketenagakerjaan. Dalam perspektif teori determinasi teknologi (technological determinism), teknologi diasumsikan sebagai faktor utama yang menentukan perubahan struktur sosial dan pola interaksi masyarakat (Marx & Smith, 1994; McLuhan, 1962). ASSiK telah menggeser cara berkomunikasi dalam proses rekrutmen kerja dari model konvensional ke sistem berbasis data dan digital, dengan sistem paperless, real-time tracking, serta user feedback berbasis sistem.

Lebih jauh, penyebaran dan adopsi ASSiK juga selaras dengan teori difusi inovasi (Rogers, 2003), yang menjelaskan bahwa adopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik teknologi (kemudahan, manfaat relatif, kompatibilitas, uji coba, dan observabilitas) serta jaringan sosial dan komunikasi yang terlibat. Melalui strategi promosi multiplatform, kerja sama lintas sektor, dan pendekatan kolaboratif, ASSiK telah menjadi model yang tidak hanya diadopsi di Surabaya tetapi juga direplikasi di daerah lain, seperti Banyuwangi.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inovasi ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-8 tentang Decent Work and Economic Growth, yaitu menyediakan pekerjaan layak, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. ASSiK memberikan ruang akses kerja yang lebih luas, terutama bagi

pemuda dan lulusan baru, sekaligus memberdayakan perusahaan untuk mengakses tenaga kerja secara lebih efisien. Dengan fitur digital yang terintegrasi, ASSiK turut memperkecil kesenjangan akses kerja yang sebelumnya dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika ditinjau dari perspektif Islam, inovasi ASSiK dapat dimaknai melalui lensa Maqasid Syariah, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu Asyur. Menurut Ibnu Asyur, maqasid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) dengan lima prinsip utama (Ibnu Asyur, 1985, 2001): *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Inovasi ASSiK secara substantif mendukung prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* dengan memberikan akses kepada pekerjaan yang halal, bermartabat, dan menghindarkan masyarakat dari kemiskinan struktural yang dapat merusak harkat manusia.

Melalui pendekatan ini, pengelolaan komunikasi media digital ASSiK tidak hanya dilihat dari sisi fungsional dan administratif, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam tata kelola pemerintahan. Proses manajemen komunikasi publik dalam aplikasi ini menjadi refleksi dari tanggung jawab sosial pemerintah terhadap pencari kerja—yakni memberi akses informasi, pendampingan digital, dan transparansi layanan, yang juga termasuk dalam konsep *ihsan* dalam pelayanan publik Islam.

Dalam konteks metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menelaah bagaimana makna dan pengalaman pengguna ASSiK dikonstruksi dalam proses komunikasi digital. Fenomenologi menekankan pemahaman subjektif atas pengalaman sosial, terutama dalam mengungkap kesadaran aktor terhadap media teknologi dan interaksi yang terjadi di dalamnya (Creswell, 2007). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan secara mendalam bagaimana pencari kerja memaknai platform ASSiK sebagai media komunikasi, sekaligus ruang representasi nilai-nilai etis dalam birokrasi publik.

Dengan melihat ASSiK sebagai entitas teknologi, sosial, dan spiritual sekaligus, maka kajian ini penting tidak hanya sebagai evaluasi teknis manajemen media komunikasi, tetapi juga sebagai refleksi integratif antara transformasi digital dan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana

manajemen media komunikasi dalam aplikasi ASSiK di Kota Surabaya dikonstruksikan, dimaknai, dan dijalankan dalam perspektif Islam.

Tinjauan Kepustakaan

Teori determinasi teknologi menekankan bahwa perubahan sosial sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi. Marshall McLuhan menyebut teknologi sebagai “extensions of man” yang membentuk bukan hanya perilaku tetapi juga kesadaran manusia (McLuhan, 1994; Rogers, 2000). Dalam konteks ASSiK, teknologi digital mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan warga, mempercepat proses rekrutmen, dan menghilangkan batas fisik dalam pelayanan ketenagakerjaan. Teknologi tidak lagi netral, melainkan menjadi kekuatan pendorong transformasi sosial (Chandler, 1995).

Difusi inovasi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam waktu tertentu di antara anggota sistem sosial (Yu, 2022). ASSiK memenuhi lima karakteristik inovasi yang mendorong adopsi luas: *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Selain itu, strategi promosi dan keterlibatan stakeholder melalui media sosial, komunitas kerja, dan pendidikan formal menjadi bagian penting dalam mempercepat difusi ASSiK.

SDGs adalah kerangka global pembangunan berkelanjutan. ASSiK sejalan dengan tujuan ke-8, yaitu “Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all” (United Nation, 2015). Dengan digitalisasi proses rekrutmen, ASSiK mendukung inklusi ekonomi dan membuka akses kerja yang lebih luas terutama bagi kelompok rentan. Ibnu Asyur menekankan bahwa maqasid syariah berfungsi sebagai prinsip dasar dalam perumusan kebijakan publik Islam (Al-Ghali, 1996; Ibnu Asyur, 1925). ASSiK dapat dikaji sebagai bentuk pelayanan publik yang menjaga *hifz al-nafs* (keselamatan jiwa dari dampak pengangguran), *hifz al-mal* (perlindungan harta melalui akses pekerjaan), dan *hifz al-’aql* (pengembangan akal melalui kerja produktif dan edukatif). Integrasi maqasid syariah ke dalam manajemen media komunikasi menunjukkan potensi etis Islam dalam inovasi teknologi publik. Manajemen media komunikasi digital adalah proses

mengelola strategi pesan, media, dan interaksi dalam platform digital untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu (Luttrell, 2015). Dalam konteks ASSiK, manajemen komunikasi meliputi penentuan konten media, desain antarmuka pengguna, interaktivitas sistem, dan pengelolaan umpan balik digital. Hal ini mencerminkan dinamika antara informasi, teknologi, dan partisipasi publik dalam sistem kerja digital (Rachman, 2017).

Ada sejumlah penelitian yang dipakai sebagai rujukan dalam artikel ini, salah satunya berjudul “Maqasid Al-Shariah In The Ai Era: Balancing Innovation And Islamic Ethical Principles”. Penelitian ini mengungkap bahwa beberapa kebijakan menunjukkan potensi besar dalam mendukung praktik keagamaan, meningkatkan hasil layanan kesehatan, mendemokratisasi pengetahuan, memperkuat hubungan keluarga, dan mendorong inklusi ekonomi (Mustapha & Malkan, 2025). Referensi lain berjudul “Maqasid Sharia and Social Development: an Inquiry into Jamaluddin Athiyah’s Renewal Paradigm”. Riset tersebut membahas persinggungan antara Maqasid Syariah dan pembangunan sosial (Abdullah, 2025). Dalam konteks pengembangan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam, konsep Maqasid Syariah menawarkan kerangka etis dan normatif yang fleksibel dalam merespons dinamika sosial dan teknologi kontemporer. Dua karya penting dapat dijadikan pijakan untuk mendalami relasi ini, yaitu artikel “Maqasid Sharia and Social Development: An Inquiry into Jamaluddin Athiyah’s Renewal Paradigm” dan “Maqasid al-Shariah in the AI Era: Balancing Innovation and Islamic Ethical Principles”. Keduanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap wacana maqasid, namun dengan fokus yang berbeda.

Relevansi kajian tersebut menjadi sangat signifikan ketika dikaitkan dengan kebijakan implementasi ASSiK di Surabaya. Kebijakan ini pada dasarnya mencerminkan lima tujuan pokok maqasid: menjaga jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Kebijakan ASSiK dapat dipandang sebagai wujud aplikatif dari maqasid syariah yang dipahami secara kontekstual, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Metode ini bertujuan untuk menggali makna subjektif yang dimiliki pengguna terhadap

aplikasi ASSiK sebagai media komunikasi digital dalam konteks pelayanan ketenagakerjaan. Fenomenologi berupaya memahami pengalaman hidup (*lived experience*) secara mendalam dari sudut pandang partisipan. Sebagaimana dijelaskan oleh Moustakas (1994), inti dari fenomenologi adalah untuk mengungkap esensi dari suatu pengalaman melalui proses reflektif dan deskriptif. Dalam konteks ini, peneliti mengeksplorasi bagaimana pengguna ASSiK—baik pencari kerja maupun pengelola sistem—memaknai penggunaan aplikasi tersebut sebagai bagian dari relasi sosial dan spiritual. Langkah-langkah penelitian fenomenologi ini mengacu pada model Creswell (Creswell, 2007), yaitu, (1) mengidentifikasi fenomena (pengalaman pengguna terhadap ASSiK); (2) mengumpulkan data melalui observasi, dan dokumentasi; (3) melakukan reduksi fenomenologis (*horizontalisasi*); (4) membangun deskripsi tekstual dan struktural dari pengalaman; (5) menyusun esensi makna kolektif dari pengalaman para partisipan dari berbagai sumber.

Hasil dan Pembahasan

Aplikasi ASSiK (*Arek Suroboyo Siap Kerjo*) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (*Disperinaker*) Kota Surabaya sebagai respons terhadap tantangan ketenagakerjaan pasca-pandemi COVID-19. Diluncurkan pada tahun 2022, ASSiK didesain sebagai platform daring yang menjembatani komunikasi antara pencari kerja dan penyedia kerja secara efisien, cepat, dan tanpa pertemuan fisik.

ASSiK hadir sebagai solusi atas tingginya angka pengangguran di Surabaya, yang sempat melonjak drastis dari 5,76% pada tahun 2019 menjadi 9,79% pada 2020 berdasarkan data BPS Surabaya tahun 2021). Aplikasi ini memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola seluruh proses rekrutmen secara *end-to-end*—mulai dari pendaftaran akun, unggah dokumen lamaran, input lowongan kerja oleh perusahaan, proses seleksi, hingga pemanggilan wawancara secara daring. Fitur-fitur tersebut memungkinkan proses yang sepenuhnya *paperless*, cepat, dan transparan.

Inovasi ini memiliki sejumlah tujuan utama (Ramadhan et al., 2025), yaitu: (1) mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, terutama lulusan baru dan masyarakat terdampak pandemi; (2) memodernisasi sistem layanan ketenagakerjaan melalui platform digital yang adaptif; (3) meningkatkan kolaborasi multipihak, termasuk perusahaan, SMK, universitas, dan masyarakat umum dalam menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan kompetitif.

Selain menjadi platform job-matching, ASSiK juga memperkuat regulasi pemerintah dalam kewajiban perusahaan menyampaikan Wajib Lapori Lowongan (WLL), menjadikan aplikasi ini sebagai bagian integral dari tata kelola ketenagakerjaan di tingkat lokal. Dalam konteks pengelolaan komunikasi, ASSiK tidak hanya sekadar kanal informasi, tetapi berperan sebagai media komunikasi digital yang menghubungkan dua entitas, pemerintah dan warga, secara interaktif. Melalui sistem notifikasi, dashboard pemantauan, dan fitur umpan balik, aplikasi ini memungkinkan manajemen komunikasi publik yang dua arah dan real time.

Efektivitas aplikasi ASSiK juga didukung oleh data implementasi hingga tahun 2024, seperti (Pemkot Surabaya, 2025): (1) 150.757 akun pencari kerja aktif; (2) 23.202 orang berhasil ditempatkan di sektor formal dan informal; (3) 100% proses rekrutmen dilakukan secara digital; (4) Tingkat kepuasan pengguna mencapai lebih dari 94%. Selain keberhasilan lokal, ASSiK juga telah direplikasi oleh sejumlah daerah lain, seperti Kabupaten Banyuwangi, yang menunjukkan bahwa inovasi ini memiliki skala adopsi nasional dan potensi sebagai model praktik baik dalam sistem ketenagakerjaan digital di Indonesia. Dengan demikian, ASSiK menjadi lebih dari sekadar aplikasi: ia adalah manajemen media komunikasi publik berbasis digital yang terstruktur, berkelanjutan, dan mampu mengintegrasikan pendekatan teknologi, partisipasi masyarakat, dan nilai-nilai pelayanan publik dalam satu platform kerja yang inklusif.

Inovasi digital ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya secara strategis dapat diposisikan sebagai kebijakan yang selaras dengan dua kerangka nilai besar: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Maqasid Syariah dalam perspektif Islam, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu Asyur. Keduanya mengusung prinsip keadilan, keberlanjutan, dan

kesejahteraan universal, yang menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan publik yang bermartabat dan berorientasi pada kemaslahatan.

ASSiK secara langsung mendukung Tujuan ke-8 SDGs, yaitu Decent Work and Economic Growth, yang menekankan pentingnya pekerjaan yang layak, produktif, dan inklusif bagi semua kalangan. Melalui transformasi digital dalam sektor ketenagakerjaan, ASSiK membuka akses lapangan kerja secara lebih adil, terutama bagi generasi muda dan kelompok marjinal di kota besar seperti Surabaya. Digitalisasi kebijakan ketenagakerjaan berkontribusi signifikan dalam pencapaian indikator SDGs, khususnya terkait peningkatan partisipasi angkatan kerja, pengurangan pengangguran terbuka, serta promosi kewirausahaan berbasis teknologi (Rachman, 2019). ASSiK, dengan sistem yang paperless, real-time, dan user-friendly, secara nyata mempercepat proses pencocokan kerja (job matching) dan meningkatkan partisipasi dunia usaha terhadap proses rekrutmen terbuka dan transparan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Selain Tujuan ke-8, ASSiK juga menyentuh Tujuan ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) serta Tujuan ke-10 (Pengurangan Kesenjangan). Inovasi ini memfasilitasi inklusi digital dalam sistem ketenagakerjaan, sekaligus menjembatani ketimpangan informasi dan peluang antara pencari kerja dan perusahaan. Platform ASSiK menghilangkan hambatan administratif, geografis, dan sosial yang sebelumnya mempersempit akses masyarakat terhadap pasar kerja formal.

Dalam perspektif Islam, pembangunan ideal bukan hanya bertujuan mencapai kemajuan material, tetapi juga menjamin masalah atau kemaslahatan umum. Maqasid Syariah sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Asyur (Ibnu Asyur, 2001) menekankan pentingnya melindungi lima aspek fundamental: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks ini, ASSiK dapat dipandang sebagai kebijakan yang mendukung secara langsung setidaknya tiga dari lima tujuan pokok tersebut: (1) Hifz al-nafs (perlindungan jiwa): Akses terhadap pekerjaan yang layak dan mudah dijangkau dapat menghindarkan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, bahkan kriminalitas yang mengancam keselamatan jiwa; (2) Hifz al-mal (perlindungan harta):

Pekerjaan memungkinkan individu memperoleh penghasilan halal, menafkahi keluarga, dan menjaga kehormatan finansial. Aplikasi ASSiK sebagai fasilitator kerja juga ikut menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat; (3) Hifz al-'aql (penjagaan akal): Melalui pelatihan digital dan peningkatan literasi kerja yang ditawarkan melalui platform ASSiK, masyarakat diasah untuk menjadi individu yang produktif dan inovatif secara intelektual.

Studi kontemporer menyebutkan bahwa integrasi Maqasid Syariah dalam kebijakan publik akan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien tetapi juga beretika dan berkeadilan sosial (Abdullah, 2025; Mustapha & Malkan, 2025). Dalam konteks digitalisasi layanan kerja, pendekatan maqasid memberikan landasan moral-spiritual yang mencegah dehumanisasi dan menjaga dimensi etis dari transformasi teknologi. ASSiK juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk ijtihad birokrasi Islam modern, di mana kebijakan yang berbasis teknologi dipandu oleh prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral kepada rakyat (*mas'uliyah*). Pemerintah bertindak sebagai *hami al-maslahah* (penjaga kemaslahatan publik) yang harus menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola yang adil, sebagaimana ditekankan oleh *Asy-Syatibi* dan para pemikir maqasid kontemporer (Bakri, 1996; Salvia & Malahayatie, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ASSiK bukan sekadar produk digitalisasi teknokratik, melainkan representasi dari ikhtiar mewujudkan pelayanan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan global dan ajaran Islam yang menjunjung kemuliaan manusia dan keadilan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen media komunikasi dalam aplikasi ASSiK di Surabaya telah dirancang dan dijalankan secara strategis sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan publik berbasis digital yang responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi pasca pandemi. Dalam konteks komunikasi publik, ASSiK tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, melainkan juga sebagai ruang interaksi dua arah antara pencari kerja dan penyedia kerja melalui sistem digital yang efisien, real-time, dan inklusif.

Dari sisi strategi komunikasi, platform ASSiK memanfaatkan pendekatan berbasis data dan otomasi sistem untuk mengelola alur informasi rekrutmen secara sistematis. Proses komunikasi ini mencerminkan praktik manajemen media digital yang adaptif, dengan penguatan pada transparansi informasi, aksesibilitas layanan, dan integrasi lintas sektor. Hal ini selaras dengan karakteristik komunikasi publik digital sebagaimana dipaparkan dalam literatur manajemen komunikasi modern.

Dalam perspektif Islam, manajemen komunikasi ASSiK mengandung nilai-nilai yang konsisten dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Aplikasi ini memberi akses kerja secara adil, membuka peluang penghidupan yang sah dan produktif, serta mendorong peningkatan kapasitas intelektual masyarakat melalui literasi digital dan sistem pelatihan kerja. Dengan demikian, ASSiK dapat diposisikan sebagai bagian dari ijtihad birokrasi modern, di mana pemerintah bertindak sebagai penjaga kemaslahatan publik (*hami al-maslahah*).

Secara global, inovasi ini juga memperlihatkan kesesuaian yang kuat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta poin ke-9 dan ke-10 tentang inovasi dan pengurangan kesenjangan. Digitalisasi proses rekrutmen melalui ASSiK menjembatani kesenjangan informasi dan memperluas inklusi sosial-ekonomi dalam dunia kerja, terutama bagi kelompok marjinal di perkotaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengguna ASSiK memaknai aplikasi ini bukan sekadar sebagai alat administratif, tetapi sebagai instrumen perubahan hidup yang memberi harapan dan akses terhadap kesejahteraan. Pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan berbasis teknologi dapat dan seharusnya diarahkan pada kemaslahatan umat secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual.

Referensi

- Abdullah, M. (2025). Maqasid Sharia and Social Development: an Inquiry into Jamaluddin Athiyah's Renewal Paradigm. *UMRAN-Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 12(2), 67–78. Retrieved from <https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/757>
- Al-Ghali, B. (1996). *Syaikh al-Jamī' al-A'zam Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Asyūr; Ḥayātuh wa Āsāruh*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chandler, D. (1995). *Technological or media determinism*. Retrieved from <https://shaunlebron.github.io/chandler-1995.pdf>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publishing Inc.
- Ibnu Asyur, M. T. (1925). *Naqd Al-'Ilmi Li Kitab Al- Islam Wa Usul Al-Hukmi*. Cairo: Al-Salafiyah.
- Ibnu Asyur, M. T. (1985). *Usul Al-Nizam Al-Islamy Fi Al-Mujtama'*. Tunisia: Syirkah Al-Tunisiyah Li Al-Tauzi.
- Ibnu Asyur, M. T. (2001). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Metadata Indikator.
- Luttrell, R. (2015). *Social media: How to engage, share, and connect* (E. Swayze & M. Manzano, Eds.). Lanham: Rowman & Littlefield.
- Marx, L., & Smith, M. R. (1994). *Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
- McLuhan, M. (1962). *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographical Man*. Toronto: University of Toronto Press.
- McLuhan, M. (1994). *Understanding media: The extensions of man*. Massachusetts: MIT Press.
- Mustapha, R., & Malkan, S. N. A. (2025). Maqasid Al-Shariah In The Ai Era: Balancing Innovation And Islamic Ethical Principles. *International Journal of Islamic Theology & Civilization*, 3(3), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15381828>
- Pemkot Surabaya. (2025). Pemkot Surabaya Targetkan Pengangguran Terbuka Turun 0,4 Persen di 2025. Retrieved July 9, 2025, from www.surabaya.go.id website: <https://surabaya.go.id/id/berita/23929/pemkot-surabaya-targetkan-pengangguran-terbuka-turun-0-4-persen-di-2025>
- Prasetyo, M. A., Nanda, A. W. M., Suyatno, A. N., Pradika, N. A., & Widiyarta, A. (2024). Collaborative Governance in the Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSiK)

- Program as an Effort to Labor Absorption in Surabaya City. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 9(2), 369–378.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i2.4611>
- Rachman, R. F. (2017). Menelaah Riuh Budaya Masyarakat di Dunia Maya. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 206–222.
- Rachman, R. F. (2019). Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 273–292.
- Rachman, R. F. (2021). Tren Pemberitaan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Media Online. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(1), 970–986.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i1.93>
- Ramadhan, A. N., Janna, P. M., Annisa, V. R., & Sandi, F. R. (2025). Inovasi Kebijakan Arek Suroboyo Siap Kerjo (Assik) Di Kota Surabaya. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(2), 734–745. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/19705>
- Rogers, E. M. (2000). The extensions of men: The correspondence of Marshall McLuhan and Edward T. Hall. *Mass Communication & Society*, 3(1), 117–135.
https://doi.org/https://doi.org/10.1207/S15327825MCS0301_06
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations, 5th Edition*. New York: Free Press.
- Salvia, P. N., & Malahayatie. (2023). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Bisnis Online. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 155–160.
- United Nation. (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015.
- Yu, P. (2022). Diffusion of Innovation theory. In *Implementation Science The Key Concepts* (p. 3). London: Routledge.